

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Ludruk Karya Budaya

1. Lokasi Grup Ludruk Karya Budaya



Gambar 4.1
Tempat Pimpinan Grup Ludruk Karya Budaya



Gambar 4.2
Tempat Latihan Grup Ludruk Karya Budaya
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Lokasi Ludruk Karya Budaya berada di Dsn. Sukodono RT 02 RW 01 Ds. Cangu Kac. Jetis Kab. Mojokerto 61310, Jawa Timur, Indonesia. Tempat pimpinan Ludruk Karya Budaya berada di depan tempat Pondok Jula-Juli Karya Budaya atau bisa di sebut tempat latihan untuk pemain Ludruk Karya Budaya.

2. Sejarah Lahirnya Grup Ludruk Karya Budaya

Ludruk tumbuh dan berkembang dengan subur, apalagi saat tahun-tahun 1950 hingga 1965. Pada tahun tersebut ludruk banyak berafiliasi dengan partai politik. Ludruk terbagi dalam beberapa kubu politik, ada yang mengikuti ideologi marhaen atau kubu PNI, ada yang mengikuti kubu PKI, dalam hal ini tersalurkan dari Lekra. Terjadinya peristiwa G/30/S, nampaknya merupakan titik balik dari keadaan ludruk sebelumnya. Setelah runtuhnya kekuasaan Bung Karno dan penumpasan kekuatan politik kiri pasca tragedi 1965, ludruk pun mengalami masa-masa sulit. Rezim militer Orde Baru mengekang bahkan melarang pementasan ludruk selama beberapa waktu. Ludruk diidentifikasi sebagai seni komunis yang lekat dengan Lekra.

Di awal dekade 70-an, ludruk kembali diizinkan untuk eksis oleh pemerintah namun dengan pengawasan dan pembinaan yang ketat oleh pihak militer. Di berbagai daerah terjadi peleburan dan pembentukan grup-grup ludruk dengan supervisi yang mutlak dari struktur komando teritorial militer. Peleburan ludruk di seluruh Jawa Timur yang dilaksanakan pada tahun 1971 yaitu eks Ludruk Marhaen di Surabaya dilebur menjadi ludruk Wijaya Kusuma Unit 1, eks Ludruk Anoraga di Malang dilebur menjadi Ludruk Wijaya Kusuma Unit II, eks Ludruk Urill A di Malang dilebur menjadi

Ludruk Wijaya Kusuma Unit III, eks Ludruk Tresna Enggal di Surabaya dilebur menjadi Ludruk Wijaya Kusuma Unit IV, dan eks Ludruk Kartika di Kediri dilebur menjadi Ludruk Wijaya Kusuma Unit V (Suprianto, 1992:18).

Peristiwa G/30/S berdampak pada kelangsungan seniman ludruk, dimana mereka banyak yang dianggap sebagai simpatisan PKI. Di akhir tahun 1960-an status seseorang yang pernah menjadi bagian PKI sangat diperhitungkan dan status mereka digolongkan menjadi beberapa kelompok. Ketika pemerintah mengeluarkan keputusan resmi bahwa semua yang menjadi anggota maupun yang bersimpati kepada PKI harus dibersihkan dari bumi Indonesia, mereka dibagi-bagi menjadi tiga kategori yaitu : pertama, kategori “A” yaitu mereka yang terlibat langsung dalam pemberontakan G 30 S, baik di pusat maupun di daerah, boleh dikatakan tokoh-tokoh utama yang langsung terlibat di dalam usaha kudeta tanggal 1 Oktober atau yang menjadi bagian inti PKI, seperti para fungsionaris partai di tingkat pusat, cabang maupun ranting (Suprianto, 1992:210). Terhadap golongan “A” pemerintah memproses melalui sidang pengadilan. Kelompok kedua disebut sebagai kategori “B” yaitu mereka yang telah disumpah atau menurut saksi telah menjadi anggota PKI atau pengurus organisasi massa yang seazas dengan PKI atau mereka yang menghambat usaha penumpasan G 30 S ke dalam kategori ini termasuk mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam percobaan kudeta 1 Oktober 1965, akan tetapi karena kedudukan dan fungsinya dalam organisasi memberinya kemungkinan besar untuk memiliki pengaruh besar dalam partai komunis, terhadap golongan “B” pemerintah melakukan pemisahan mereka dari masyarakat dengan cara mengumpulkan

mereka di dalam satu tempat dengan tujuan mengamankan mereka dari kemarahan-kemarahan rakyat dan mencegah jangan sampai mereka melakukan kegiatan yang menghambat upaya penertiban keamanan yang dilakukan pemerintah. Golongan “C” adalah mereka yang pernah terlibat dalam pemberontakan PKI-Madiun atau anggota ormas seazas dengan PKI atau mereka yang bersimpati atau telah terpengaruh sehingga menjadi pengikut PKI. Terhadap golongan “C” pemerintah memberikan bimbingan dan mereka bebas hidup di dalam masyarakat sehingga diharapkan akan menjadi warga negara yang baik (Suprianto, 1992:210).

Kelompok kesenian yang berhaluan komunis termasuk kedalam kelompok C dan diberi sebutan khusus yakni kelompok seniman ludruk santiaji, kelompok tersebut berada di bawah pembinaan moral oleh TNI. Ludruk mengalami masa vakum selama kurang lebih dua tahun sekitar 1965-1968. Hal tersebut nampaknya juga terjadi di Mojokerto, khususnya desa Cangu. Grup ludruk yang terakhir berdiri adalah Ludruk Kartika Sakti yang dibubarkan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1965 karena dianggap Lekra. Tidak hadirnya ludruk di tengah-tengah masyarakat digantikan oleh hiburan lain seperti gambus dan mulai muncul musik dangdut. Hiburan yang muncul hanyalah hiburan musik dan nyanyian.

Di awal tahun 1969, ludruk kembali diizinkan untuk eksis oleh pemerintah namun dengan pengawasan dan pembinaan yang ketat oleh pihak militer. Di berbagai daerah terjadi peleburan dan pembentukan grup-grup ludruk dengan supervisi yang mutlak dari struktur komando teritorial militer. Esensi seni ludruk yang awalnya merupakan wadah perlawanan rakyat

terhadap penguasa pun berangsur hilang. Ludruk beralih menjadi alat propaganda berbagai program pemerintah Orde Baru.

Ludruk dimunculkan kembali, namun keberadaan ludruk ini didirikan dan dikontrol oleh TNI dan Polri. Di berbagai daerah mulai bermunculan grup ludruk, di Mojokerto Kota ada ludruk Bayangkara, di Jombang ada ludruk Putra Birawa, Madiun Kopasgad, dan di Malang ludruk Wijaya Kusuma, dan di Surabaya.

Setelah berbagai grup ludruk telah muncul, di Mojokerto khususnya desa Cangu juga mendirikan sebuah ludruk yang bernama Karya Budaya. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi didirikannya ludruk Karya Budaya. *Pertama*, dari masyarakat Cangu sendiri menginginkan adanya grup ludruk yang mampu menghibur seperti sebelumnya. Keinginan masyarakat Cangu ini tidak lain merupakan wujud rasa kerinduan masyarakat terhadap pertunjukan ludruk, sedangkan untuk mementaskan ludruk dalam masa Orde Baru bukanlah hal yang mudah. Sebuah ludruk dapat berdiri dengan bantuan dan dukungan dari militer. Begitu rindu dan keinginan masyarakat desa Cangu untuk melestarikan ludruk, maka masyarakat sekitar meminta seorang anggota militer yaitu Pak Bantu yang bertempat tinggal di desa Cangu untuk memimpin sebuah ludruk. Desakan dari masyarakat tersebut akhirnya membuat Pak Bantu akhirnya mau memimpin sebuah ludruk. Pak Bantu yang memang mempunyai kedekatan dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Mojokerto saat itu, Mayor TNI Ismail sehingga mempermudah untuk mendirikan ludruk. **Pada tanggal 29 Mei 1969, maka dibentuklah ludruk Karya Budaya.**

Kedua, terbentuknya ludruk Karya Budaya ini beberapa anggotanya adalah orang-orang intelektual yang merupakan guru dan PNS. Terbentuknya sebuah grup ludruk Karya Budaya ini sebenarnya bukanlah dari orang-orang yang mumpuni di bidang kesenian ludruk, namun keanggotaannya masih dari beberapa kalangan pekerja lain.

Tujuan mereka dalam mendirikan ludruk Karya Budaya ini adalah untuk menunjukkan monoloyalitas mereka terhadap Golkar. Saat itu mereka merupakan para pemuda yang tergabung dalam GPM (Gerakan Pemuda Marhaenis) yang tentu saja merupakan pendukung Soekarno, yang pada awalnya tidak mau bergabung dengan Golkar. Sikap antipati tersebut berdampak pada pekerjaan mereka sebagai seorang pegawai negeri, yaitu tidak diberikannya gaji bulanan, sehingga hal tersebut membuat mereka tidak sanggup bertahan dan pada akhirnya menyerah pada keadaan dan masuk sebagai pendukung Golkar. Kesediaan untuk masuk kepada Golkar agaknya masih diragukan dan untuk membuktikan hal tersebut, para pemuda tersebut berinisiatif mendirikan sebuah grup ludruk ini yakni “Karya Budaya”.

Perlunya menjaga kestabilan politik, pembangunan nasional, dan integrasi nasional telah digunakan sebagai alat pembenaran bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan politik, termasuk yang bertentangan dengan demokrasi. Salah satunya prinsip monoloyalitas pegawai negeri sipil. Prinsip itu digunakan untuk melindungi Orde Baru dari gangguan-gangguan yang mungkin timbul dari musuh-musuh Orde Baru (Budiardjo, 2009:132).

Selain untuk membuktikan monoloyalitas pada Golkar, mereka juga ingin melestarikan ludruk, agar ludruk juga tidak punah. Dalam mendirikan

ludruk ini merangkul seorang anggota Polri yakni Cak Bantoe tak lain merupakan orang tua dari Pak Edi. Cak Bentoe diangkat sebagai pemimpin dengan alasan bahwa memang dia yang mempunyai kedudukan dan memang secara pencitraan merupakan anggota Polri yang bisa dibilang anggota dan pendukung Golkar.

Bukti lain yang menunjukkan bahwa pada awalnya ludruk Karya Budaya berafiliasi dengan Golkar, bisa dilihat dari nama ludruk itu sendiri sudah tercermin adanya nama Golkar yakni nama Karya itu sendiri. Penamaan ludruk Karya Budaya sudah tercermin citra bahwa ludruk tersebut memang di- *backing*-i oleh Golkar.

Berdirinya ludruk Karya Budaya tersebut oleh Golkar dimanfaatkan dengan baik. Ludruk menjadi alat partai politik untuk menarik simpati massa. Ludruk adalah media yang dapat menyampaikan pesan secara efektif, terutama bagi masyarakat level bawah. Massa akan tertarik dengan ideologi yang diusung partai politik dengan hanya melihat dan mendengar pertunjukan ludruk, sekalipun mereka belum melek huruf. Keterlibatan Golkar untuk menyetir kesenian ludruk bisa jadi adalah bentuk ketakutan mereka kepada alasan ideologis yaitu adanya bahaya komunisme.

Kesenian selama pemerintahan Orde Baru memang memiliki peran yang cukup dominan. Hubungan antara seni dengan politik kekuasaan sangat kuat yang terlihat dari pertunjukan ludruk dalam memposisikan seni sebagai bagian dari pondasi kekuasaan. Politik senantiasa menjadi raja atau panglima dan kesenian menjadi (dianggap) sebagai pasukan yang kadang dijadikan ujung tombak. Kenyataan demikian dapat dikatakan bahwa kesenian

dijadikan sebagai tunggangan baik itu tokoh ataupun partai politik. Banyak di antara seni tradisional dan modern yang dibebani jargon partai politik tertentu.

Kesenian telah dijadikan media untuk mengolah massa. Hal ini dapat dilihat pada beberapa fenomena, misalnya kampanye politik dalam rangka kemenangan Golkar pada setiap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan kampanye program-program pembangunan Golkar yang merupakan kendaraan politik penguasa Orde Baru dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya, senantiasa menggunakan paguyuban ludruk Karya Budaya sebagai kendaraan dan media yang sangat efektif guna meraih massa sebanyak-banyaknya. Kesenian yang dipentaskan untuk keperluan itu umumnya harus rela dibayar murah dengan dalih dedikasi.

Pada rezim Orde Baru, secara ideologis seniman ludruk diseleksi dengan ketat melalui lembaga penelitian khusus atau Litsus. Seniman yang secara ideologis menganut paham Marxisme atau berindikasi terlibat organisasi terlarang PKI dikategorikan sebagai seniman yang dilarang naik ke pentas seni pertunjukan rakyat. Seniman Ludruk pada masa Orde Baru diwajibkan mengikuti penataran P-4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) di samping itu, para pejabat yang mengemban tugas menjaga stabilitas negara memerintahkan agar seniman ludruk tidak melakukan kritik sosial terhadap kebijaksanaan pemerintah. Aturan-aturan tersebut berdampak membelenggu kreativitas seniman Ludruk atau penumpulan kemampuan kritik sosial masyarakat (Budiardo, 2009:132).

Berdirinya ludruk Karya Budaya melalui pembinaan di kapolsek merupakan salah satu bentuk yang dilakukan para desa Canggu agar dapat mempertahankan adanya ludruk di desa tersebut. Berarti disini para pendiri ludruk Karya Budaya sadar bahwa akan adanya kooptasi. Hal tersebut dilakukan karena dengan pertimbangan eksistensi, namun terjadi suatu distorsi dalam ludruk ini, dimana ludruk ini tidak bisa membawa sepenuhnya eksistensi seperti ludruk pada masa Orde Lama yang sejatinya ludruk merupakan kritikus bagi para penguasa.

Keterbatasan kemampuan para seniman ludruk dalam menghadapi ketatnya kontrol kekuasaan dan keinginan untuk tetap survive mengharuskan mereka untuk bisa bersiasat di tengah kontestasi kepentingan-kepentingan kuasa luar yang mencoba masuk. Dalam ruang gerak yang terbatas, mereka tetap berupaya melakukan strategi dan negosiasi dengan pihak yang mencoba menguasainya, meskipun tak bisa menghindarkan diri dari kekuasaan yang sifatnya hegemonik, tindakan resistensi ini ternyata mampu menciptakan ruang bagi mereka untuk menjadi subyek yang berbicara. Dengan demikian, ludruk tetap bisa melakukan pertunjukan.

B. Peran Ludruk Karya Budaya Sebagai Media Pembangunan Pada Masa Pemerintah Orde Baru

Sejalan dan selaras dengan kebijakan pembangunan, pemerintah Orde Baru menugaskan kepada Departemen Penerangan RI untuk menggerakkan semua media penerangan, termasuk media pertunjukan rakyat tradisional agar mampu sebagai media penerangan pembangunan. Hal yang sedang terjadi ini,

dalam teori kritis merupakan komunikasi politik yang yang sudah mengalami pemusatan dan tidak lagi sehat. Secara ideal, komunikasi tersebut meski bebas dan terbuka, dan tidak ada tekanan, yang dimaksud tekanan disini adalah ketentuan-ketentuan yang sifatnya mutlak ditentukan oleh pihak yang mendominasi yaitu pemerintah, secara konkrit dapat dibuktikan bahwa Ludruk Karya Budaya juga menjadi media pembangunan, dimana di dalam pementasannya banyak menampilkan pesan-pesan pembangunan yang memihak pada pemerintah.

Hal tersebut dapat dilihat dari kidungan-kidungannya dan cerita yang disuguhkan. Hal tersebut tercemin dari penampilan Ludruk Karya Budaya sendiri pada bentuk Kidungannya, contoh kidungan saat dibawakan grup Ludruk Karya Budaya untuk menyampaikan program-program pembangunan adalah sebagai berikut (Ismawati dan Pamungkas, 2017):

1. *Sebagai wanita pendamping suami
Ngatur rumah tangga kudu sing ngerti
Duwe anak kudu diwatesi
Perlune gampang olehe ngopeni*

(Sebagai wanita pendamping suami
Mengatur rumah tangga harus yang pandai
Punya anak harus dibatasi
Supaya mudah merawatnya).

2. *Anak loro dadi ukurane
Supaya cukup pendidikane
Iso cerah masa depane
Urip mandiri dadi tujuane*

(Anak dua jadi ukuran
Supaya cukup pendidikannya
Bisa cerah pendidikannya
Hidup mandiri jadi tujuannya).

Menurut kutipan kidungan itu tersirat pesan pembangunan. Kidungan tersebut mempunyai sasaran yang dituju yaitu sasarannya adalah semua warga masyarakat Indonesia, sedangkan yang disampaikan jelas mengenai pembangunan, untuk kidungan yang pertama sampai keempat menyampaikan tentang program Keluarga Berencana. Maksud dari tujuan program berencana adalah agar dalam membangun keluarga bisa sejahtera. Kidungan yang kelima sasarannya masih juga kepada masyarakat yang isinya memberitahukan bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah aturan/dasar negara yang paling utama yang menjadi tujuan bangsa, tujuan bangsa akan terwujud dengan melakukan pembangunan bersama-sama. Kidungan keenam memberitahukan bahwa program jangka pendek merupakan pembangunan agar biaya hidup bisa murah dengan begitu rakyat dan negara bisa hidup sentosa. Kidungan ketujuh mengajak masyarakat agar berpartisipasi untuk bersatu membangun bangsa dan negara. Kidungan kedelapan memberitahukan bahwa kesenian ludruk juga ikut berjuang untuk menyambung jawatan penerangan lewat cerita dan syairan yang sudah ditentukan bidang kebudayaan, dan seterusnya. Dari beberapa kidungan itu semuanya mempunyai persamaan yakni kidungan-kidungan tersebut berpihak pada pemerintah agar masyarakat mendukung kegiatan pemerintah.

Ludruk Karya Budaya sebagai media pembangunan sangat efektif saat itu, apalagi memang bentuk hiburan elektronik saat itu masih sedikit. Kebijakan pemerintah yang bertajuk pembangunan tersebut, nampaknya tidak selamanya membawa kebaikan bagi para seniman. Sebetulnya jika diperhatikan lebih dalam lagi, hal tersebut malah bertentangan dengan jati diri

ludruk yang sebenarnya. Ludruk tak lagi bersifat egaliter, ludruk tercerabut sebagai lidah rakyat. Bagi mereka ludruk telah menjadi teks kekuasaan atau paling tidak yang nampak adalah etos kepahlawanan dan nasionalisme yang ditonjolkan dengan maksud untuk mensosialisasikan perilaku ketaatan tanpa syarat kepada negara, atau demi alasan stabilitas negara.

Kondisi itu menyebabkan antusiasme masyarakat terhadap ludruk mulai berkurang karena pementasan tidak lagi menyuarakan hati nurani rakyat dan pelawak tidak ubahnya *juru penerangan* (Ismawati dan Pamungkas, 2017). Di berbagai daerah, kelompok-kelompok yang dibentuk dan dibina oleh aparat militer dan polisi berlangsung sampai dengan tahun 1975-1977. Meskipun demikian, untuk tetap mengendalikan perkembangan ludruk, setiap kelompok termasuk juga kelompok kesenian yang lain harus mendapatkan nomor induk agar lebih mudah untuk mengaturnya. Selain itu, para seniman ludruk juga diwajibkan mengikuti Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebuah proyek nasional untuk mencetak “manusia-manusia Pancasila” yang terbebas dari pengaruh ideologi kiri demi terciptanya stabilitas negara dan menyukseskan pembangunan nasional (Supriyanto, 2012:81).